

**Empowering Educational Actors and Institutions  
to Promote Religious Moderation in Preventing  
Violent Extremism**

# Policy Brief Series

Issue 3. Vol. 4, 2021

Policy Brief Series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

# Penguatan Simpul Moderasi Beragama di Kampus Islam

**UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan  
Gunung Djati, UIN Sunan Kalijaga**

**Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat  
(PPIM), UIN Jakarta**

## Pendahuluan

**M**oderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya (Kemenag, 2019).

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Agama tidak perlu dimoderasi, cara penganut agama dalam menjalankan agamanya yang perlu dimoderasi.

Islam jalan tengah (*wasathiyah*) sebagai aktualisasi moderasi beragama Islam di Indonesia disebut Azyumardi Azra (2020) telah berkembang sejak masa pertengahan abad ke-13 di Indonesia. Aktualisasinya tampak jelas dalam ormas-ormas Islam Indonesia sejak dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Mathla'ul Anwar, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Jamiatul Khair, al-Irsyad, Nahdlatul Wathan (NW) dan masih banyak lagi.

Ormas-ormas ini menjadi arus utama Islam Indonesia, yang dari pergerakannya, lembaga pendidikan Islam termasuk pendidikan tinggi Islam lahir. Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan *masterpiece* lembaga pendidikan Islam Indonesia dengan visi integrasi keilmuan, ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. Bersama dengan ormas-ormas Islam tersebut, pendidikan tinggi Islam dikenal sebagai pilar “Islam moderat” di Indonesia (Bruinessen, 2009: 219; Lukens-Bull, 2013: 32). Para alumni pendidikan tinggi Islam, terutama pada dekade 1980-an dan selanjutnya, terserap dalam kerangka berpikir yang tersimpul dalam ideologi pembangunan, atau modernisasi. Mereka mengembangkan wacana tentang Islam dan modernitas secara intensif (Jabali dan Jamhari, 2002).

Belakangan, khususnya dalam satu dekade terakhir, pendidikan tinggi Islam ini mendapat tantangan dari gelombang Islam transnasional yang mengusung paham dan praksis keagamaan yang kaku, literal dan radikal. Sejalan dengan itu, pendidikan tinggi Islam memiliki kerentanan kuat dihadapkan pada perilaku ekstremisme kekerasan dan radikalisme. Hal ini tercermin dalam berbagai penelitian seperti Survei BNPT (2017), PPIM UIN Jakarta (2017), dan Setara Institute (2019).

Kementerian Agama menurunkan moderasi beragama ke dalam empat (4) indikator yaitu 1) Komitmen Kebangsaan, 2) Toleransi, 3) Anti-Kekerasan dan 4) Akomodasi terhadap budaya lokal (Moderasi Beragama, 2019). Sebagai kementerian yang secara langsung bekerja dalam bidang manajemen umat beragama di Indonesia, Kementerian Agama menjadi *leading sector* dalam mengembangkan konsep, implementasi, dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama ketika konsep moderasi beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Dalam posisi sebagai *leading sector* tersebut, Kementerian Agama telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya terdapat butir-butir implementasi moderasi beragama dalam setiap program kerja yang dirancangnya; membentuk Satuan Tugas (Satgas) implementasi moderasi beragama; dan lebih dari itu adalah melibatkan PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri) untuk melakukan pengkajian, mengembangkan metode implementasi, sekaligus implementasi moderasi beragama di kalangan civitas akademika.

Lebih lanjut, agenda moderasi beragama diaplikasikan ke dalam lingkungan PTKIN secara kelembagaan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama). Melalui Edaran Dirjen Pendis terse-

but, pimpinan PTKIN diminta mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama di kampus masing-masing. Rumah Moderasi Beragama ini dimaksudkan menjadi tempat penyemaian, edukasi, pendampingan, dan penguatan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKIN. Melalui kebijakan tersebut, Kemenag tidak hanya melibatkan kampus, yang berisi kalangan terpelajar, untuk terlibat, tetapi juga menjadikannya sebagai garda terdepan dalam mengawal, mengembangkan, dan mengimplementasikan Moderasi Beragama.

Berdasarkan Edaran Dirjend Pendi, sejumlah Perguruan Tinggi Islam mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Sampai dengan Februari 2021 terdapat sebanyak 38 lembaga. Meskipun demikian, pada praktiknya lembaga rumah moderasi beragama tersebut—sebagaimana layaknya lembaga baru—masih mencari bentuk dan peta jalan yang strategis dalam mengarusutamakan moderasi beragama di kalangan sivitas akademika (FGD, 2020). Namun, sejumlah penelitian dengan moderasi beragama sebagai subjek sudah mengalami peningkatan, tentu dengan berbagai variasi dan konteksnya, di kalangan sivitas akademika Perguruan Tinggi Islam (contoh: Mahyuddin, Pikhulan, dan Fajar, 2020; Winata, Sudrajat, Yuniarsih & Zaqiah, 2020).

Sebagai lembaga yang masih muda, mayoritas Rumah Moderasi Beragama masih mencari bentuk dan model yang akan ditempuh, baik pada dimensi kelembagaan maupun dimensi program, terutama dalam merumuskan program-program *mainstreaming* moderasi beragama, yang tepat sasaran. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, belum ada model implementasi di

PTKIN yang dipergunakan sebagai bentuk ketahanan (*resilience*) dari ekstremisme-keras (VE/*Violent-Extremism*). Kedua, implementasi moderasi beragama akan lebih strategis jika sejalan dengan konteks budaya, sistem, dan tantangan spesifik yang dihadapi setiap PTKIN. Ketiga, kapasitas institusi—dalam hal ini institusi Rumah Moderasi Beragama—merupakan faktor strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam mengimplementasikan moderasi beragama di PTKIN.

Berdasarkan alasan tersebut, kegiatan penelitian dan penguatan institusi ini dilakukan dengan fokus pada konsep moderasi beragama, penguatan Rumah Moderasi Beragama, dengan menawarkan diagnosis terhadap realitas sivitas akademika melalui penelitian, dan langkah-langkah strategis serta modul yang dapat diterapkan untuk penguatan moderasi beragama. Pada aspek penelitian, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kondisi moderasi beragama di PTKIN serta mengidentifikasi di bagian moderasi beragama apa yang bisa menjadi fokus *capacity building* dalam meningkatkan moderasi beragama. Dengan tujuan sebagai *pilot project*, kegiatan ini hanya berlangsung di tiga PTKIN, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ketiga PTKIN tersebut dipilih secara sengaja dengan argumen yang bersifat subjektif bahwa ketiganya dapat dijadikan sebagai model bagi PTKIN lain dalam penguatan moderasi beragama. Sedangkan pada aspek penguatan kapasitas (*capacity building*), kegiatan ini akan memberikan strategi pelatihan dan modul kepada lembaga Rumah Moderasi Beragama.

## Definisi dan Konsep

Seperi disebutkan, Kementerian Agama menetapkan empat indikator moderasi beragama: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan dan 4) akomodatif terhadap budaya lokal (Moderasi Beragama, 2019).

Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Untuk dapat mengukur keempat indikator tersebut, digunakan beberapa konsep yang secara pendekatan, teknik dan metodologi memiliki kedekatan dan kesamaan makna.

Komitmen kebangsaan digunakan sebagai indikator moderasi beragama, karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sebaliknya, menunaikan kewajiban warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Dimensi	Kalimat Penjelasan & Keterangan	Turunan Perilaku
Komitmen Kebangsaan	"..sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan terhadap Azas Berbangsa di UUD 1945</li> <li>• Melakukan aktivisme dan partisipasi sebagai warga negara yang baik</li> <li>• Rasa <i>trust</i> kepada negara</li> </ul>
Toleransi (Ekstra-Intra dan Praktik yang mengakomodasi budaya lokal)	<p>"..sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini."</p> <p>"..kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi."</p> <p>(Kedua Indikator ini digabung karena memiliki perilaku serupa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi masuk ke level 4 <i>Intercultural Stage Bennet</i> → hanya 'menerima'.</li> <li>• Penelitian ini mengambil level 5-nya yaitu saling memahami dan bisa melihat dari sudut pandang orang lain (empati).</li> <li>• Boer dan Muryick (2015) → toleransi memerlukan kesadaran memperlakukan setiap individu punya hak asasi manusia dan empati.</li> <li>• Empati diterjemahkan ke dalam empati antar umat beragama atau aliran agama.</li> <li>• Memperlakukan orang lain sesuai hak asasi manusia (kesetaraan) diukur dengan <i>social dominance orientation</i>.</li> </ul>
Anti-Kekerasan	"..radikalisme atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai <i>belief</i> anti kekerasan</li> </ul>

Gambar 1. Variabel Konsep Moderasi Beragama

Menggunakan kata kunci "kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan", ditetapkan variabel indikator sebagai berikut (1) *Support for democratic principles and practices (attitudes)*, (2) *Support for democratic principles and practices (behavioural intentions)*, (3) *Openness for diversity*, and (4) *Nationalism*.

Toleransi dalam moderasi beragama merupakan toleransi antar agama dan toleransi intra agama, baik terkait toleransi

sosial maupun politik. Toleransi merupakan sikap memberi ruang, sedia berdialog dan mampu menyikapi sekte minoritas (baik aliran agama minoritas ataupun praktik agama yang mengakomodir budaya lokal).

Toleransi mengisyaratkan sikap hormat, menerima orang yang berbeda dari dirinya, dan berpikir positif. Variabel indikator untuk toleransi adalah (1) *Empathy (Affective, Cognitive, Awareness)* (2) *Social Dominance Theory* (3) *Perception to Conservatism and*

*Liberalism in Practicing Religion (4) Traditional (Local) Values.*

Anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama dipicu oleh ekstremisme kekerasan yang perwujudannya dimulai dari “ideologi transnasionalisme, takfiri”. Item variabel sebagai konstruk psikologis penolakan penggunaan kekerasan menggunakan item BRAVE (*Building Resilience Against Violent Extremism*) (Grossman, et al, 2020).

Untuk memperkuat makna moderasi beragama dalam konteks individu dan kelembagaan, kualitas institusi perguruan tinggi secara regulatif, struktur dan administratif

diukur melalui praktik mempromosikan moderasi beragama dalam program, kegiatan, kurikulum, pembelajaran dan juga kebijakan di Perguruan Tinggi.

Sebagai sebuah konsep, indikator moderasi beragama belum memiliki model implementasi yang dapat dipergunakan sebagai bentuk ketahanan (*resilience*) dari radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Penelitian ini dilakukan untuk dapat membaca kemampuan moderasi beragama sebagai sebuah konsep ke dalam ranah praktis, utamanya pada Perguruan Tinggi Islam Negeri yang keberadaannya merupakan k ultimasi dari tumbuh kembang Islam *wasathiyah* di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) Perguruan Tinggi Islam Negeri yang telah dinyatakan sebagai Universitas, yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang merupakan prosedur penelitian yang menggabungkan pengumpulan dan analisis hasil dengan metode kuantitatif dan kualitatif.

Jenis Populasi	Sub-Populasi	Deskripsi Populasi	Kuota N per Rumpun Fakultas	Kuota N per PTKIN	Kuota N Total
Mahasiswa (Kuota N = 1080)	Mahasiswa Umum	Mahasiswa tahun ke-1 hingga tahun ke-3, meliputi mahasiswa umum	106	318	954
	Mahasiswa Key Actor	Merupakan nama mahasiswa aktif yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum	14	42	126
Non-Mahasiswa (Kuota N = 180)	Dosen Key Actor	Merupakan nama mahasiswa aktif yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum	10	30	60
	Dosen PKN dan Studi Islam	Dosen yang mengajar mata kuliah PKN dan Studi Islam	4	12	36
	Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Pejabat fakultas yang perwenang mengeluarkan kebijakan strategis terkait Akademik dan Kemahasiswaan	6	18	54

- Proportionate quota random sampling
- Random quota sampling
- Snowball sampling

\*akan dibuat quota seimbang untuk gender perempuan dan laki-laki

Gambar 2. Ilustrasi Sampling Survey

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan metode survei yang ditujukan ke ketiga PTKIN target. Tiga populasi dijadikan sampel; mahasiswa umum, mahasiswa rujukan, serta dosen dan pejabat fakultas. Mahasiswa umum yang dimaksud adalah mahasiswa dari ketiga PTKIN yang direkrut secara *random* dan terstrata dari setiap fakultas di masing-masing PTKIN.

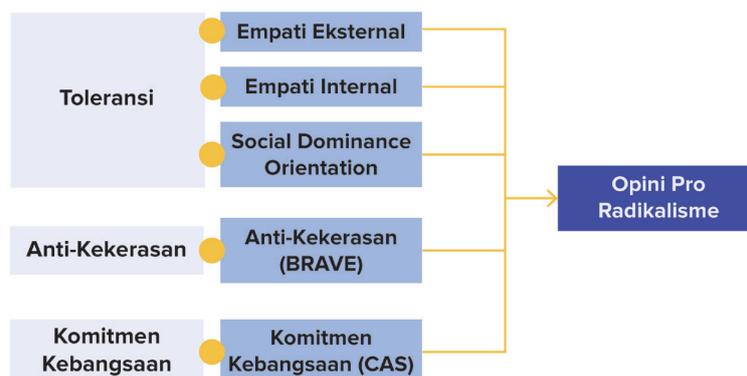
Mahasiswa rujukan adalah mahasiswa yang dianggap berpengaruh terhadap pandangan politik dan agama oleh mahasiswa yang direkrut secara *random*. Dosen dan pejabat fakultas terdiri dari beberapa sub-populasi; dosen PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) dan Kajian Islam yang direkrut secara *random*, dosen yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum, dan pejabat-pejabat fakultas. Dalam rekrutmen partisipan penelitian ini mengupayakan agar sampel seimbang secara gender. Sebagian besar pengisian survei dilakukan secara daring dengan menggunakan platform *Limesurvey* dan aplikasi *Zoom*.

Variabel prediktor yang diukur dalam studi kuantitatif adalah empati, *social dominance orientation*, anti-kekerasan, serta perilaku dan sikap kewarganegaraan. Variabel-variabel ini merupakan operasionalisasi dari moderasi beragama. Pengukuran variabel empati dilakukan menggunakan alat ukur adaptasi dari *ethnocultural empathy* (Wang, et al. 2003), yang dibagi menjadi empati terhadap penganut agama lain, yang di dalam penelitian ini dipergunakan agama Kristen

sebagai acuan (empati eksternal) dan penganut aliran lain yang dianggap sesat (empati internal). Aliran yang digunakan untuk pengukuran empati internal adalah berdasarkan pilihan partisipan terkait aliran mana yang dia anggap paling berbeda dengan Islam yang dipraktekkan responden (mis. Ahmadiyah, Syiah).

*Social Dominance Orientation* (SDO), atau kecenderungan individu untuk menyetujui hierarki dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat, diukur dengan adaptasi SDO7 (Ho, et al. 2015). Untuk mengukur sikap anti-kekerasan, penelitian ini menggunakan adaptasi dari sebagian dari skala BRAVE (Grossman, et al. 2020). Variabel-variabel prediktor ini diuji apakah dapat memprediksi variabel kriteria, yaitu kesetujuan dengan opini-opini yang menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan atas nama Islam atau negara Islam, yang diukur dengan menggunakan revisi skala Opini Pro Ekstremisme Kekerasan.

Semua skala yang digunakan adalah skala Likert 1-6 (mis. Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Agak Tidak Setuju, Agak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). Analisis yang akan dilakukan adalah menguji apakah variabel-variabel moderasi beragama benar-benar memprediksi variabel OpRad (Gambar 3). Untuk melakukan ini, kami menggunakan *multilevel regression* dengan populasi mahasiswa umum sebagai sampel analisis.



Gambar 3. Model yang diuji dalam analisis regresi

Metode kuantitatif digunakan pada penelitian ini sebagai “baseline”, yang tujuannya mendapatkan gambaran awal sampel, serta variabel yang menjadi target intervensi. Tahapan yang disebut dengan “diagnose” ini dilakukan dengan melakukan survei berbasis 4 (empat) moderasi beragama kepada mahasiswa dan *stakeholders*.

Temuan yang dihasilkan dari survey kuantitatif dikonfirmasi ke dalam studi kualitatif yang dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* dengan empat jenis peserta yaitu mahasiswa tingkat 2, mahasiswa *key actors* (merupakan ketua Lembaga organisasi mahasiswa atau yang namanya muncul menjadi rujukan), dosen (yang mengajar mata kuliah PPKN dan Pengantar Studi Islam, juga dosen yang namanya muncul dalam survey kuantitatif sebagai dosen rujukan) dan pihak pejabat PTKIN (Wakil Rektor, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga/Pusat Kajian).

Pemilihan *sample* dilakukan secara *purposive sampling*. FGD dilakukan secara *online* lewat platform meeting *zoom*. Kualitatif ini berfokus pada eksplorasi penggalian pemahaman moderasi beragama di mahasiswa, penerimaan definisi dan indikator moderasi beragama di Dosen dan Pejabat serta praktik PTKIN dalam meningkatkan moderasi beragama. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memilih beberapa tema (kumpulan *coding* dari pernyataan dalam transkrip verbal) yang paling sering disebut dari total 12 FGD yang dilakukan.

## Hasil Survei

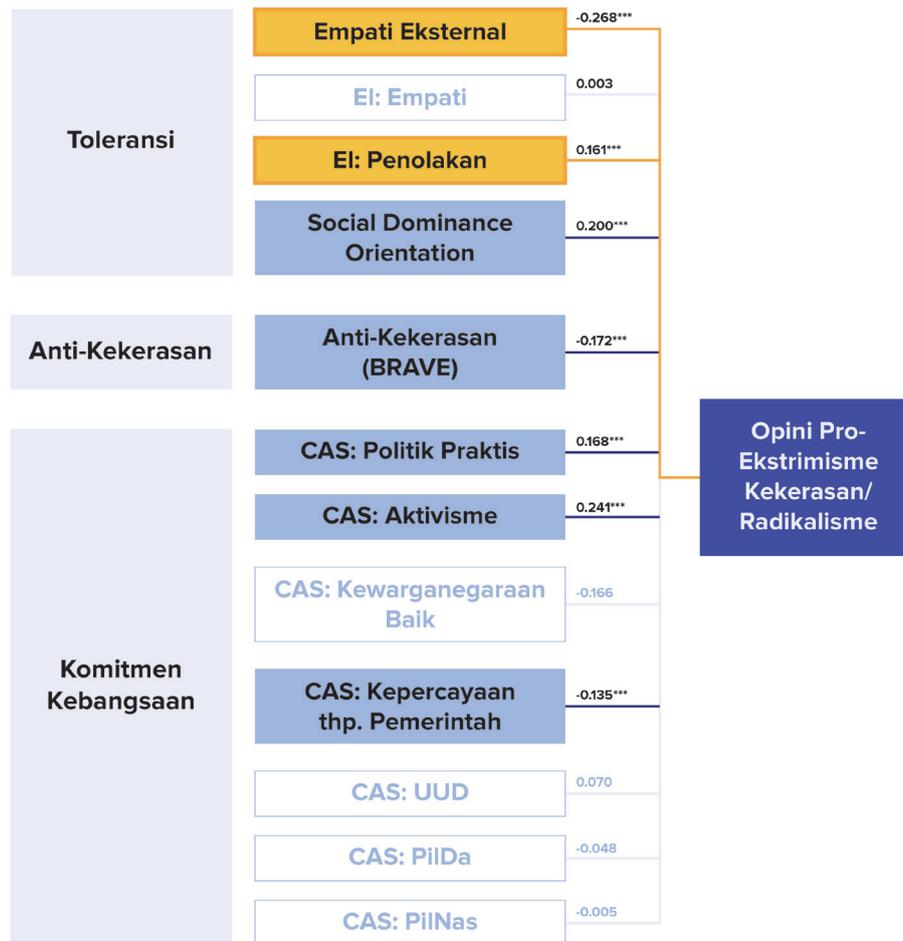
Setelah mengurangi sampel yang tidak lolos uji atensi menggunakan item *attention check* dan mengurangi jumlah pencilaan statistik, total sampel yang kami gunakan dalam analisis adalah 846 orang mahasiswa, Usia rata-rata adalah 20.45 tahun.

Sebanyak 48% dari partisipan adalah laki-laki.

Analisis *multilevel regression* menunjukkan hampir semua faktor dari variabel-variabel moderasi beragama memprediksi opini pro-VE, walaupun arah dari prediksinya tidak selalu sesuai dengan perkiraan awal:

- a) Empati eksternal: lebih tinggi kecenderungan seseorang untuk berempati kepada umat agama lain, dalam hal ini spesifiknya penganut agama Kristen, lebih rendah kemungkinan ia akan menjustifikasi tindakan ekstrim untuk membela Islam atau mendirikan negara Islam.
- b) Penolakan Internal: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk apatis atau merasa gelisah dengan keberadaan penganut aliran lain di dalam Islam yang dianggap sesat, maka semakin ia akan semakin setuju dengan opini pro-VE/OpRad.
- c) SDO: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk menyukai hierarki dan ketidaksetaraan, semakin setuju pula ia dengan opini pro-VE/OpRad.
- d) Anti-Kekerasan: Semakin anti-kekerasan seseorang, semakin rendah kesetujuannya dengan opini pro-VE/OpRad
- e) Politik praktis dan aktivisme: Semakin seseorang menunjukkan intensi terlibat dalam politik praktis dan aktivisme, semakin besar pula kesetujuannya terhadap opini pro-VE/OpRad
- f) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan: Semakin besar kepercayaan seseorang terhadap sistem pemerintahan (mis. Sistem pemerintahan pusat, daerah, penegakkan hukum), semakin rendah kesetujuannya terhadap opini pro-VE/OpRad.

Ringkasan hasil tersebut dapat dilihat di Gambar 4.



Gambar 4. Model hasil analisis. Angka menunjukkan koefisien regresi yang tidak terstandarisasi (lebih besar maka lebih besar pula kekuatan variabel tersebut dalam memprediksi OpRad), dan bintang (\*) menandakan hubungan yang signifikan secara statistik.

Selain dari hasil analisis regresi, juga dilakukan analisis deskriptif untuk melihat variabel mana yang terindikasi rentan. Penelitian ini menemukan bahwa empati, baik eksternal dan internal merupakan variabel yang rentan.

Skor untuk faktor pengambilan perspektif (kecenderungan seseorang untuk mencari tahu lebih dan berusaha menempatkan diri di posisi orang lain) untuk empati eksternal masih rendah ( $M=3.14$ ,  $SD=.86$ ), dari skor maksimum (6). Empati secara umum untuk internal juga rendah ( $M=2.92$ ,  $SD=.89$ ), dan penolakan tinggi ( $M=3.67$ ,  $SD=.97$ ). Hal ini menunjukkan baik empati eksternal dan internal dapat dijadikan target intervensi di tiga kampus Islam tersebut.

Dari temuan ini, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. Pertama, hampir semua variabel moderasi beragama memprediksi opini pro-VE/OpRad secara signifikan. Hal ini mendukung anggapan bahwa moderasi beragama, paling tidak dalam operasionalisasinya sebagai sebuah keterampilan sosial, memprediksi pandangan-pandangan ekstrim dalam memperjuangkan agama. Kedua, untuk kepentingan intervensi, kami menemukan bahwa empati—yang menjadi dasar toleransi—merupakan aspek moderasi beragama yang mungkin paling penting untuk dijadikan target.

## Hasil Kualitatif

### Terminologi Moderasi Beragama

Dari 4 (empat) indikator moderasi beragama, toleransi merupakan *term* yang paling banyak didiskusikan oleh mahasiswa peserta FGD. Pembahasan mengenai toleransi berlangsung baik eksternal (antar pemeluk agama) maupun internal (antar aliran dalam satu agama).

*Term* kedua yang menjadi lokus kajian adalah komitmen kebangsaan yang terejawantahkan melalui persetujuan atas Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang diyakini telah sesuai dengan ajaran/nilai agama Islam dan memenuhi unsur nasionalisme/cinta tanah air. Anti kekerasan merupakan *term* yang tidak banyak dibicarakan dalam diskusi, namun muncul *term* serupa, seperti tidak ekstrem.

Tidak ekstrem yang dimaksud di sini adalah terkait dengan tidak berada dalam posisi yang ekstrem kanan/kiri, tidak berlebihan dalam beribadah, atau tidak berlebihan memaksakan sesuatu paham ajaran agama tertentu.

Indikator dan definisi yang dipakai dalam penelitian ini juga diterima oleh mayoritas Dosen dan Pejabat, namun kalangan Dosen dan Pejabat kampus di tiga kampus Islam tersebut memandang konsep moderasi beragama belum memiliki operasionalisasi perilaku moderasi beragama dengan *clear cut* yang jelas.

Beberapa responden memberikan masukan revisi terkait indikator moderasi beragama di mana revisi yang dimaksud adalah dengan mengkombinasikan indikator yang ada dengan 12 nilai moderasi beragama (*Tawasuth, l'tidal, Tawazun*, dan seterusnya) atau menambahkan komitmen keagamaan yaitu menjalankan ajaran agama dengan benar.

### Implementasi Moderasi Beragama

Secara general, para peserta FGD meyakini adanya faktor-faktor yang dianggap dapat memengaruhi fluktuasi moderasi beragama seseorang, antara lain: wawasan keagamaan, latar belakang keilmuan dan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan, eksposur dari media terkait dengan radikalisme dan ekstremisme kekerasan serta keikutsertaan dan/atau relasi individu dalam organisasi kemahasiswaan.

Para Dosen dan Pejabat secara tegas menyatakan bahwa moderasi beragama sudah menjadi agenda bahkan ruh bagi PTKIN. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu kepada materi “Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya”, karya Prof. Dr. Harun Nasution. UIN Sunan Kalijaga merujuk kepada Prof. Dr. Abdul Mukti Ali yang memprakarsai Dialog Antarumat Beragama dan merevitalisasi forum Musyawarah Antarumat Beragama.

Sebagai sebuah terminologi, moderasi beragama telah menjadi tema program dan kegiatan ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan seminar, kegiatan kemahasiswaan, Pengenalan kampus dan berbagai webinar menggunakan tema inti moderasi beragama. Namun, sebagai sebuah konsep kerja yang terejawantahkan ke dalam satu sistem institusi, ketiga perguruan tinggi sepakat belum memiliki konsep operasional yang jelas.

Bahwa tetap ditemukan unsur-unsur moderasi beragama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan andragogi, sifatnya berdasarkan penuturan responden FGD masih bersifat parsial. Pada ketiga kampus Islam tersebut, data dan prosedur serta mekanismenya secara terpadu belum ditemukan. Ini artinya gerakan moderasi beragama masih bersifat individual-personal, belum menjadi gerakan kelembagaan.

Ketiga perguruan tinggi juga mengakui bahwa moderasi beragama juga dibutuhkan

kan di kalangan dosen yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keislaman yang memadai. Beberapa dosen menganggap perubahan IAIN menjadi UIN membuka peluang dosen dalam bidang-bidang sains dan teknologi untuk bergabung. Kalangan dosen ini sesungguhnya membutuhkan wawasan keislaman yang moderat—sejalan dengan variabel moderasi beragama yang dipergunakan dalam penelitian ini. Tidak heran jika secara mayoritas, baik dosen, mahasiswa dan maupun pimpinan memandang penting Rumah Moderasi Beragama.

## Empati: Variabel Rentan Intoleransi

Temuan hasil survey yang mengisyaratkan nilai empati di mana empati eksternal yang rendah dalam hal pengambilan perspektif dan empati internal yang rendah serta penolakan terhadap kelompok minoritas, di hampir semua kalangan, baik di mahasiswa dan dosen, sasaran penelitian mengindikasikan adanya kerentanan pada indikator toleransi.

Ini merupakan ruang di mana intervensi bisa dilakukan jika penguatan moderasi beragama merupakan agenda mendesak yang harus dilakukan. Rumah Moderasi Beragama, sebagai lembaga baru di lingkungan kampus Islam, merupakan lembaga yang harus

diperkuat kapasitasnya. Dari lembaga inilah akan keluar rumusan program dan pelatihan yang secara spesifik diarahkan pada *mainstreaming* moderasi beragama di kampus Islam.

Beberapa saran yang muncul dari peserta FGD untuk mengoperasionalkan moderasi beragama ke dalam sistem kurikulum, misalnya dengan mengintegrasikannya ke dalam satu proses pembelajaran MKDU (Mata Kuliah Dasar Universitas) dengan menggunakan metodologi pembelajaran tertentu yang mendorong keterbukaan dan mampu meningkatkan empati, dapat menjadi pertimbangan dalam menghadapi kerentanan ini.

Selain itu, PTKIN juga diharapkan dapat memperbanyak kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Dari segi organisasi, diharapkan adanya operasionalisasi visi-misi yang terintegrasi terkait dengan moderasi beragama yang dikawal dengan monitoring dan evaluasi kegiatan *mainstreaming* yang dilakukan. Adanya kebutuhan untuk regulasi rumah moderasi beragama untuk menjadi ortaker juga diajukan dalam FGD. Selain itu PTKIN juga harus ikut terlibat dalam sosialisasi moderasi beragama di masyarakat.

Tiga perguruan tinggi secara kapasitas memiliki SDM yang cukup untuk dapat menuangkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam satu konsep kurikulum terpadu.

## Rumah Moderasi Beragama (RMB)

Tiga kampus Islam sasaran penelitian sepakat dan mendukung penuh edaran Ditjen Pendidikan Islam No B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tentang Pembentukan Rumah Moderasi Beragama. Akan tetapi bagaimana menjalankan peran, tugas dan fungsinya, ketiga perguruan tinggi negeri masih belum memiliki konsep dan arah yang jelas.

Pembentukan RMB baik di UIN Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta sifatnya non-struktur, sehingga kewenangan dan ruang lingkup jangkauan pergerakannya secara internal dan eksternal pun terbatas. Sebagai lembaga non struktur, Rumah Moderasi Beragama tidak memiliki alokasi penganggaran yang bersifat langsung dari sumber keuangan kampus.

Dengan posisinya tersebut, tumbuh kembang Rumah Moderasi Beragama sangat bergantung dua aspek. Pertama, kreatifitas pengelolanya untuk membangun kerjasama dan jaringan. RMB di ketiga perguruan tinggi secara bersamaan disahkan dan dibentuk pasca edaran terbit. RMB di UIN Jakarta adalah Pusat Kajian Moderasi Beragama yang disahkan di November 2020. RMB di UIN Bandung bernama Rumah Moderasi Beragama disahkan di awal tahun 2020 dan RMB di UIN Yogyakarta adalah Pusat Moderasi Beragama dan Kebhinekaan yang ditetapkan juga di November 2020.

## Protokol SMR dan Modul Pelatihan Moderasi Beragama sebagai *social skills*

**P**rotokol SAPA - SALAM - RANGKUL atau yang disingkat menjadi SMR adalah sebuah tawaran pendekatan terintegratif *mainstreaming* moderasi beragama yang bisa dilakukan oleh PTKIN. Sesuai dengan kata dalam SAPA-SALAM-RANGKUL, terdapat tiga bagian besar dalam meningkatkan moderasi beragama di PTKIN yang dalam masing-masing huruf di kata tersebut merupakan akronim dari tahapan yang dilakukan, yaitu:

### a. SAPA : Selidik - Asesmen - Pendampingan (Aspek Preventif)

Usaha membangun data kondisi empirik moderasi beragama di lingkungan mahasiswa dengan menyebarkan skala moderasi beragama pada mahasiswa. Dari hasil skala tersebut, dibuat interpretasi dan *mapping* kondisi moderasi beragama dan menilai langkah yang perlu dilakukan untuk siswa yang

membutuhkan. Langkah ini diakhiri pendampingan pada mahasiswa yang dianggap nilai moderasi agamanya rendah.

### b. SALAM: Sinergisasi - Asesmen - Latih - Monitoring dan Evaluasi (Aspek Promotif)

Sebuah pendekatan untuk bekerja sama dengan lembaga kemahasiswaan dalam memastikan aktivitas dalam organisasi kemahasiswaan bisa bersinergi mengarusutamakan moderasi beragama, maka pengurus organisasi kemahasiswaan haruslah punya *skill* moderasi beragama. Pendekatan ini melibatkan asesmen awal terkait kondisi moderasi beragama calon pengurus, lalu calon pengurus ini mengikuti pelatihan *social skills moderasi beragama* dan terakhir kondisi moderasi beragamanya dipantau setelah pelatihan bahkan setelah dia terjun ke dalam organisasi yang dia ikuti. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, pengurus organisasi kemahasiswaan dapat membuat program yang mempromosikan moderasi beragama di organisasinya.

### c. RANGKUL : Respon - Analisis - Narasikan - Kaji Ulang - Rehabilitasi (Aspek Kuratif Rehabilitatif)

Aspek ini ditujukan kepada mahasiswa yang sudah tidak bisa ditangani dalam tahapan Pendampingan di SAPA karena makin menunjukkan kerentanan terhadap ekstremisme kekerasan. Dalam melakukan Analisis-Narasi-Gali dan Kaji Ulang, bisa melibatkan profesional seperti psikolog, internal PTKIN atau *stakeholder* lain. Setelah didiagnosis, mahasiswa dapat mengikuti proses rehabilitasi yang dianggap tepat.

Selain protokol, juga dibuat modul pelatihan moderasi beragama sebagai *social*

*skills* sebagai modul yang bisa dipakai pada tahapan SALAM. Modul ini bertujuan untuk membangun moderasi beragama dalam aspek kemampuan sosial seperti kemampuan fleksibilitas dalam menyadari identitas diri dan kelompok, menyadari bias pribadi terkait relasi dengan kelompok lain. Meningkatkan kemampuan empati dan *perspective taking*, khususnya pada kelompok yang berbeda serta meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Modul ini terdiri dari 7 sesi utama dalam membangun *skills* yang dibutuhkan.

## Kegiatan Capacity Building dan Technical Assistance

Sebagai bentuk *Capacity Building*, telah dilakukan *technical Assistance* dengan mengundang 38 Rumah Moderasi Beragama dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, dipaparkan hasil penelitian dan praktik modul yang dihasilkan. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi. Dalam kegiatan *capacity building* juga digagas usulan untuk membangun jejaring konsorsium antara rumah moderasi beragama PTKIN se-Indonesia—yang sepenuhnya didukung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Untuk mengukur kebermanfaatan *capacity building*, dibagikan kuesioner yang disebar-

kan pada durasi 20 menit sebelum acara berakhir yang mengevaluasi hasil penelitian, protokol dan model pelatihan yang telah dipaparkan. Dari 25 data kuesioner yang masuk, dapat disimpulkan jika peserta *capacity building* menganggap relevan topik dan penelitian yang dilakukan dan hasilnya akan mereka gunakan sebagai masukan dalam membangun program di institusi RMB.

Kegiatan *Technical Assistance* merupakan Kegiatan Semi Pelatihan dan Diskusi mengenai Protokol SMR dan Modul Pelatihan Moderasi Beragama sebagai *social skills* yang menargetkan ketua/direktur dan pengurus Rumah Moderasi Beragama di tiga UIN yang menjadi tempat penelitian. *Technical assistance* mengombinasikan metode ceramah, praktik dan diskusi dalam menjelaskan protokol serta mencoba sesi-sesi yang ada dalam modul pelatihan. Ada sembilan orang ketua dan pengurus yang bergabung di *technical assistance* kali ini. Dari evaluasi yang disebar menggunakan kuesioner yang diisi oleh tujuh orang partisipan, dapat disimpulkan jika partisipan *technical assistance* mempunyai evaluasi positif terkait dengan relevansi dan kebermanfaatan informasi mengenai protokol dan modul pelatihan. Peserta juga mempunyai intensi untuk mengadaptasi protokol dan modul yang telah dibuat. Selain materi, peserta *technical assistance* juga puas terhadap cara fasilitator membawakan materi dan menjawab pertanyaan. Yang terakhir peserta juga merasa pelatihan berjalan cukup kondusif dan menyenangkan.

## Rekomendasi

Moderasi Beragama sebagai sebuah konsep tampaknya telah diterima secara matang, diakui dan dirasakan kebutuhannya oleh ketiga Perguruan Tinggi (UIN Jakarta, Bandung dan Yogyakarta). Namun secara operasional dan praktikal, masih membutuhkan kerja keras untuk merumuskan implementasinya secara sistematis.

Tingkat kerentanan pada unsur Empati yang memfluktuasi nilai toleransi dan intoleransi di garis tipis menunjukkan bahwa operasionalisasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi

Keagamaan Negeri mutlak dilakukan.

Beberapa rekomendasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sebagai bagian dari otoritas kebijakan pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Regulasi Struktur Kelembagaan Rumah Moderasi Beragama yang jika dimungkinkan menjadi bagian terpadu dalam Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Perguruan Tinggi, jika tidak dimungkinkan mengingat agenda penyederhanaan birokrasi, mungkin dapat dibuat regulasi khusus advokasi struktur dimana program dan kegiatan turunan moderasi beragama dilembagakan ke dalam satu mata kuliah tertentu dan atau kegiatan pelatihan bersertifikat sebagai syarat kompetensi dalam SKPI;
- 2) Indeks pengukuran terpadu sebagai alat evaluasi moderasi beragama di PTKIN, hal ini dapat menjadi alat deteksi dini kerentanan dan ketahanan moderasi beragama di masing-masing perguruan tinggi, sehingga PTKIN sebagai simpul Islam *wasathiyah* dapat terus terjaga eksistensinya;
- 3) Panduan/SOP bagi rumah moderasi dalam menjelaskan cakupan tugas dan fungsinya, baik dalam PTKIN itu sendiri maupun ke dalam masyarakat.

Adapun bagi pihak PTKIN atau dalam hal ini Rumah atau Institusi moderasi beragama, rekomendasi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan modul dasar bagi masing-masing Rumah Moderasi Beragama dalam mengembangkan bidang cakupannya yang terdiri dari
  - a. Modul Pendidikan dan Pelatihan; yang menjadi basis bagi para dosen dalam menyisipkan tema/ nilai moderasi beragama dalam pembelajaran maupun pelatihan moderasi beragama di kalangan dosen atau mahasiswa
  - b. Model Kajian dan Penelitian yang menjadi panduan *civitas academica* dalam mengadakan penelitian mengenai moderasi beragama
  - c. Sosialisasi serta advokasi dan pendampingan masyarakat; yang menjadi panduan *civitas academica* untuk mensosialisasikan moderasi beragama di luar PTKIN.
- 2) Memasukkan agenda moderasi beragama dalam rencana kerja terintegrasi di PTKIN yang dikawal dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, baik ditujukan untuk mengetahui dan memantau performa *civitas academica* terkait moderasi beragama maupun untuk mengawasi jalannya *mainstreaming* moderasi beragama di PTKIN;



Empowering Educational Actors and Institutions  
to Promote Religious Moderation in PVE

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No.5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten  
15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | Email: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com)  
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:

